

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan juga bertanggung jawab. Akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor utama untuk menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dimana prinsip akuntabilitas yaitu setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber, dan penggunaan wewenang harus diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Dan transparansi memiliki arti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam hal pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta yang berhubungan dengan suatu keputusan perlu memegang akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa anggaran pemerintah adalah dokumen penting hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai belanja yang disusun untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau biaya yang diperlukan apabila terjadi keuntungan atau kerugian, maka anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan member landasan bagi usaha mendapatkan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk periode tertentu yang biasanya mengikuti periode tahunan. Tetapi, tidak juga menutup kemungkinan bahwa akan disiapkan anggaran untuk jangka waktu kurang ataupun lebih dari setahun. Kinerja anggaran adalah potensi pemerintah

daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu saja dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan. Selama ini, sektor publik seringkali dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instansi sering merugi serta tuntutan masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Seperti fenomena yang terjadi di kabupaten pesawaran beberapa bulan lalu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran mendapatkan lampu kuning mengenai temuan indikasi kerugian negara pada 11 paket pekerjaan peningkatan jalan APBD tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK Lampung menemukan bahwa adanya indikasi kekurangan volume pada 11 pekerjaan tersebut dengan indikasi kerugian negara lebih kurangnya sekitar Rp 556,386 juta dari 11 paket pekerjaan dengan total kontrak mencapai sekitar Rp 11 miliar. Temuan kerugian negara yang sebesar itu mendapat sorotan Barisan Aliansi Lembaga Anti Korupsi (BALAK). Ketua Balak, Julianda, menegaskan bahwa setiap temuan BPK atas hasil pemeriksaan atau uji petik di lapangan atas suatu hasil pekerjaan proyek yang dibiayai keuangan negara selalu terjadi. Julianda juga meminta pengembalian kerugian negara sesuai hasil pemeriksaan BPK segera dilaksanakan, dikarenakan jika tidak bisa pasti ada konsekuensi hukum atas temuan tersebut. Julianda juga mengungkapkan bahwa adanya pengakuan sejumlah rekanan yang sudah setor sejak sebelum pilkada dan baru mendapat pekerjaan di tahun 2021.

Dari 11 temuan BPK, diantaranya kekurangan volume pada pekerjaan peningkatan jalan ruas Harapan Jaya – Sinar 3 Kecamatan Way Ratai sebesar Rp 45,515 juta. Dari hasil pemeriksaan BPK, proyek yang dikerjakan PT GAP dengan nilai kontrak sekitar Rp 1 miliar ditemukan pada pekerjaan Laston AC - WC tidak sesuai ketebalan yaitu 4 cm dengan kekurangan volume diperkirakan

sebesar Rp 27,476 juta dan pada pekerjaan lapen terdapat kekurangan volume sebesar Rp 18.048 juta. Berikutnya pekerjaan peningkatan jalan ruas Sinar 3 Lubuk Baka oleh CV AKP dengan nilai sebesar Rp 1,181 miliar. berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi kekurangan volume pada pekerjaan Laston AC – WC yang terpasang tetapi tidak sesuai standar dengan kekurangan volume sebesar Rp 44 juta. Lalu ada pekerjaan peningkatan jalan ruas Wates – Harapan Jaya Way Ratai yang dikerjakan oleh PT GAI dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,179 miliar. dalam kegiatan ini pada pekerjaan Laston AC – WC yang tidak sesuai dengan standar berakibat kekurangan volume sebesar Rp 30,282 juta dan kekurangan pada pekerjaan lapen sebesar Rp 5, 697 juta. Kemudian BPK juga menemukan indikasi pekerjaan tidak sesuai persyaratan pada proyek peningkatan ruas jalan Sukajaya Lempasing – Umbul Buah dengan nilai Rp 81,053 juta yang dikerjakan oleh CV KCC (sumber : undercover channel, 2021).

Masalah yang sering timbul pada kinerja anggaran yaitu masih banyaknya anggaran yang belum dilakukan secara ekonomis seperti biaya yang tinggi, hasil yang minimum, atau anggaran yang digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan (skala prioritas). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah bagian dari sektor publik yang diamati dikarenakan pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Tuntutan baru agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan pelayanan melalui konsep *value for money* dalam melaksanakan kegiatannya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dapat memperbaiki hal yang menjadi penyebab pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasarkan pada *value for money*. Hal tersebut bisa diwujudkan oleh pemerintah dengan cara menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja agar hasilnya dapat maksimal dengan penggunaan dana seminimal mungkin. Upaya tersebut adalah cara pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yaitu dengan pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang baik sangatlah penting untuk kelangsungan dan perkembangan organisasi dikarenakan erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat banyak. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip *value for money* dan wajib untuk dilakukan. Penerapan prinsip *value for*

money dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Tujuan dari pengukuran kinerja dengan konsep *value for money* adalah mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan hasil yang maksimal dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Mardiasmo (2002).

Untuk mencapai pengelolaan anggaran yang baik ada faktor akuntabilitas. Menurut Halim dan Ikbal (2012) dalam penelitian Umami & Nurodin (2017) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan tindakan dan kinerja dari seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam penelitian Arifani, Salle, dan Rante (2018) dikatakan bahwa aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas yaitu publik memiliki hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas juga merupakan sebuah instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Aplikasi akuntabilitas didalam penyelenggaraan pemerintah diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik, pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaiannya sehingga program tersebut dapat memberikan hasil ataupun dampak semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan.

Ada faktor transparansi yang juga merupakan faktor untuk mencapai pengelolaan anggaran yang baik. Menurut Dwiyanto (2015) dalam penelitian Umami & Nurodin (2017) transparansi merupakan penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya praktik kepada pihak yang

membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi memiliki 2 aspek yakni yang pertama, komunikasi publik oleh pemerintah dan yang kedua, hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Transparansi merupakan titik awal dari manajemen kinerja yang baik. Transparansi ini harus seimbang juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang bertugas mengamati dan menilai proses perencanaan dan pengendalian anggaran (Halim & Kusufi, 2012). Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang disusun dapat berjalan dengan baik sesuai dengan konsep *value for money*. *Value For Money* dapat dicapai dengan baik apabila pemerintah sudah menggunakan biaya input yang paling kecil untuk mencapai output yang optimal guna mencapai tujuan (Safitri, 2019).

Dalam penelitian Safitri (2019) menyatakan bahwa faktor lain untuk mencapai pengelolaan anggaran yang baik yaitu dengan adanya partisipasi anggaran. Partisipasi adalah keikutsertaan individu secara mental dan emosional didalam organisasi dan tercapainya cita-cita serta melakukan pertanggungjawaban bersama-sama. Dan dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan penganggaran, karyawan akan termotivasi karena adanya kesempatan untuk mewujudkan kreativitas dan inovasinya. Partisipasi anggaran juga mengomunikasikan rasa bertanggung jawab untuk manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Partisipasi adalah salah satu unsur yang penting untuk meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safitri (2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan

dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya)”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada OPD di kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah disampaikan, peneliti mengambil judul “**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* di OPD Kabupaten Pesawaran**”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdapat pada objek penelitiannya yaitu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Adapun variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Partisipasi Anggaran. Sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*. Dengan masa Jabatan minimal 1 tahun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* di OPD Kabupaten Pesawaran ?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* di OPD Kabupaten Pesawaran ?
3. Apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* di OPD Kabupaten Pesawaran ?
4. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* di OPD Kabupaten Pesawaran ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di OPD Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di OPD Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di OPD Kabupaten Pesawaran.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada OPD di Kabupaten Pesawaran.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi IIB Darmajaya

Sebagai sarana media promosi kampus IIB Darmajaya tepatnya pada tempat penelitian berlangsung dan diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan masalah lain untuk pengembangan dan pertimbangan penelitian bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

1.5.2 Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yakni mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada pemerintahan daerah.

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan kinerja anggaran pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini berisi penjelasan mengenai teori yang mendasari penelitian, variable apa saja yang digunakan dalam penelitian, gambaran kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini berisi penjelasan mengenai sumber dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, apa saja variable yang digunakan serta definisi operasionalnya, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini berisi penjelasan mengenai hasil, analisis dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran setelah dilakukan nya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN